



Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Yogo Prasetyo Pri Hutomo

Antisipasi Masyarakat Bingung, Sosialisasi PPDB Lebih Masif

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dalam waktu dekat segera bergulir. Setiap kali PPDB berlangsung, muncul berbagai pertanyaan masyarakat. Terutama menyangkut aturan dalam penyelenggaraan PPDB. Sesuai kewenangan, Pemkot Yogyakarta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB SD dan SMP negeri.



Harapannya agar tidak terjadi kebingungan di tingkat bawah, ada baiknya sosialisasi PPDB harus dibuat semakin masif."

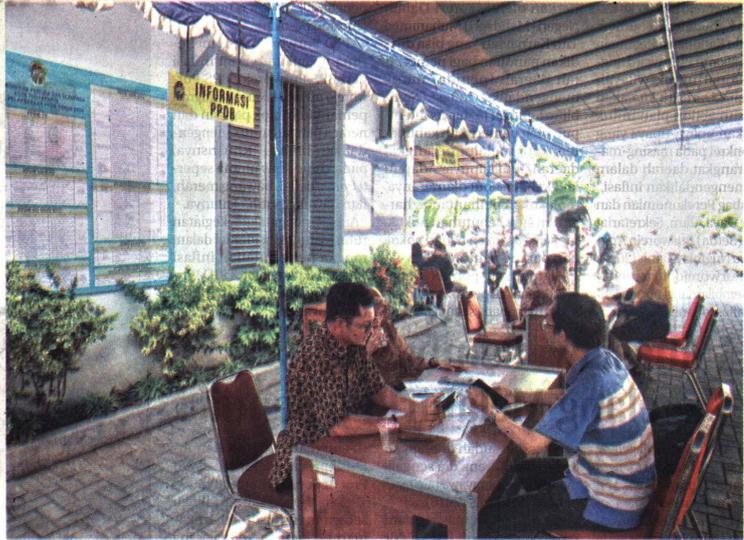
YOGO PRASETYO PRI HUTOMO
 Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja

"**HARAPANNYA** agar tidak terjadi kebingungan di tingkat bawah, ada baiknya sosialisasi PPDB harus dibuat semakin masif," pinta Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Yogo Prasetyo Pri Hutomo kemarin (20/6). Dengan sosialisasi secara masif melibatkan banyak elemen dan pemangku kepentingan, diharapkan masyarakat benar-benar paham dengan berbagai tahapan PPDB. Ini karena hampir setiap tahun regulasi PPDB sering mengalami penyesuaian dan perubahan.

Dalam catatan Yogo pelaksanaan PPDB setiap tahunnya kerap kali menemui kendala. Baik secara teknis maupun nonteknis. Bahkan sering kali masyarakat tak terlalu paham dengan berbagai syarat maupun jalur yang disediakan.

Menyikapi itu, dia mewanti-wanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta lebih optimal menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. "Jangan, ada lagi siswa maupun orang tua yang kebingungan," harap dia.

PPDB SMP negeri di Kota Yogyakarta membuka tujuh jalur pendaftaran. Yakni jalur prestasi bibit unggul, zonasi radius, afirmasi, penyandang disabilitas, jalur perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru. Lalu afirmasi keluarga menuju sejahtera (KMS), zonasi daerah, serta jalur prestasi luar daerah.



BIAR TAK KELIRU: Sejumlah orang tua siswa SMP berkonsultasi dengan petugas terkait aturan PPDB di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. PPDB SMP negeri 2024 menerapkan tujuh jalur. Ini yang harus dipahami orang tua dan calon siswa.

"PPDB 2024 ini, diperlukan sosialisasi masif, khususnya terkait jalur-jalur yang tersedia," terang kader Partai Golkar ini. Politisi kelahiran 1976 itu menilai, dalam hal pelayanan pendidikan, Kota Jogja relatif sudah cukup bagus dibandingkan dengan daerah lain. Itu antara lain karena Pemkot Yogyakarta

sudah berinisiatif menyediakan jaminan pendidikan daerah (JPD) dan bantuan bagi siswa yang kesulitan mengambil ijazah karena kendala biaya. Menurut Yogo, dari hasil studi bandingnya ke daerah-daerah lain, kebijakan seperti JPD dan bantuan pengambilan ijazah hampir tidak ada. Lantaran

mayoritas bantuan pendidikan hanya berdasar dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola dinas sosial. "Saat kelulusan atau kenaikan kelas banyak sekali kasus terkait pembiayaan karena keadaan ekonomi orang tua. Karena tak masuk DTKS tidak dapat bantuan," paparnya. (inu/kus/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005